

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi merupakan indikator dalam proses pembangunan sebuah negara, terlebih bagi negara yang sedang berkembang di mana pembangunan diarahkan untuk mencapai tingkat kemakmuran bagi rakyatnya. Di Indonesia, tujuan tersebut tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk “Memajukan kesejahteraan umum”.

Tujuan ini memiliki maksud bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia merupakan prioritas terpenting dalam proses pembangunan Indonesia, karena pada dasarnya pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang terpusat, tidak merata serta tidak diimbangi kehidupan sosial, politik, ekonomi yang demokratis dan berkeadilan dapat menghasilkan fundamental pembangunan ekonomi yang rapuh, dimana hal tersebut telah mengakibatkan Indonesia terjebak dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan serta menurunnya daya saing ekonomi nasional.

Hal tersebut dapat dilihat ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 yang mengakibatkan menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar dan situasi pada sektor riil menunjukkan banyak usaha-usaha besar yang gulung tikar. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 lalu, yang diawali dengan krisis nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan krisis moneter telah

mengakibatkan perekonomian Indonesia mengalami suatu resesi yang besar dan berpengaruh negatif hampir kepada seluruh lapisan masyarakat terutama dalam bentuk tingkat inflasi yang tinggi, pendapatan riil masyarakat perkapita menurun, dan pengangguran serta kemiskinan meningkat.<sup>1</sup>

Hal ini perlu dicermati kembali bahwa pembangunan ekonomi yang baik harus memiliki struktur yang kuat dan dapat bertahan dalam situasi apapun, serta menempatkan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagai prioritas utama. Dengan mengembangkan perekonomian rakyat yang didukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, Yang nantinya akan menciptakan lapangan kerja yang memadai dan mendorong meningkatnya pendapatan masyarakat, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Terkait dengan hal tersebut, sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang tangguh ditengah krisis ekonomi. UMKM makin tahan banting dan tetap optimistis ditengah krisis, hal ini dibuktikan ketika badai krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1997-1998, usaha berskala kecil dan menengah relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar.

Hal ini dikarenakan mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu tergantung pada modal besar atau pinjaman dari luar dalam mata uang asing. Bertahannya usaha mikro, kecil maupun menengah (UMKM) dalam menghadapi krisis dan kondisi perekonomian yang tidak stabil telah menunjukkan betapa pentingnya sektor ini dalam perekonomian nasional. Pentingnya usaha kecil menengah khususnya di

---

<sup>1</sup> Sri Margana dan Widya Fitrianiingsih, SEJARAH Indonesia: Perspektif Lokal dan Global, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2010, hlm.158.

Negara berkembang sering dikaitkan dengan masalah ekonomi dan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, dan yang lainnya. Artinya, keberadaan UKM diharapkan dapat memberi kontribusi positif terhadap upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut di.<sup>2</sup>

Terkait dengan itu pada tahun 1999 munculah program pemerintah yaitu PT PNM yang merupakan salah satu cara yang programnya dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan. PT Permodalan Nasional Madani (Persero), selanjutnya disebut PNM merupakan Lembaga Keuangan Khusus yang didirikan sebagai relisasi komitmen pemerintah untuk mengembangkan, memajukan serta memelihara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berbeda dengan KUR, PT PNM Mekar ini hanya ditunjukan kepada ibu Rumah Tangga produktif, namun prasejahtera.

Yaitu wanita yang hidup dibawah garis kemiskinan, dan pinjaman pun berkisar di bawah Rp. 2-5 juta kesetiap nasabah tanpa adanya jaminan bagi nasabah tersebut, untuk kredit KUR dimaksudkan untuk nasabah yang berutang yang mempunyai usaha dan bermaksud untuk mengembangkan usahanya. Mereka juga memberikan jaminan seperti BPKB motor dan bukti kepemilikan surat tanah dan bangunan. Program PNM benar-benar ditunjukan untuk masyarakat yang kurang mampu.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Tulus Tambunan, *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 2.

<sup>3</sup> <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>: diakses pada tanggal 18 Juli 2019 pukul 13:03.

Kelurahan Antapani Kidul merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Antapani menjadi sasaran Mekar PNM. Kelurahan Antapani Kidul terdiri dari RW 19 dan RT 107 dan memiliki 4095 KK dengan tingkat kemiskinan 10,21% dari jumlah penduduk yang diantara 780 KK dengan jumlah 2897 jiwa oleh karenanya PNM hadir di Kecamatan Antapani khususnya Kelurahan Antapani Kidul karena PT PNM ini ada di setiap Kecamatan di Bandung.<sup>4</sup> Pelaksanaan PNM di Kelurahan Antapani Kidul ini hanya dikhususkan bagi masyarakat pra sejahtera atau yang membutuhkan dana bantuan untuk membuat usaha baru atau mengembangkan usaha yang sudah ada.

Dalam hal ini, PNM mensurvei setiap keluarga yang akan diberikan bantuan modal, untuk dididik dan diberikan modal agar mereka dapat tumbuh menciptakan usaha secara mandiri agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dibalik itu dampak sosial yang diberikikan oleh PT PNM ini menjadikan masyarakat perduli dengan lingkunganya karena dalam sistem pinjaman uang tersebut terdapat peraturan dimana setiap nasabah yang ingin meminjam diharuskan untuk berkelompok sebanyak 30 orang dengan asumsi, apabila survey menyetujui mereka untuk mendapatkan bantuan, akan mendapatkan sekitar Rp. 60 Juta untuk dikelola.dan apabila gagal, maka mereka harus menanggung bersama dan untuk pembayaranpun masyarakat diharuskan untuk berkumpul semua di suatu tempat, pembayaran mingguan dengan nominal Rp. 50 ribu dengan menggunakan system tanggung

---

<sup>4</sup> Profil Kelurahan Antapani Kidul, h. 13.

renteng, yang artinya apabila salah satu nasabah tidak bisa membayar maka semua atau salah satu nasabah di dalam kelompok itu harus membayarnya dahulu.<sup>5</sup>

Di sini timbul rasa kebersamaan dan tolong menolong di dalam sebuah kelompok nasabah. Tetapi program tersebut tidak terus berjalan baik dan sebagai mestinya seperti kurangnya penanganan yang komprehensif atau optimal dan kinerja berkelanjutan terhadap penerima pinjaman yang mengakibatkan penerima menyalahgunakan pinjaman setidaknya bagaimana mestinya meskipun PT Permodalan Nasional Madani (Persero), atau PNM akan membuka cabang baru untuk program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera ( Mekaar) salah satunya adalah PT PNM Mekar yang bertempat di Kecamatan Antapani Kota Bandung.

Akan tetapi untuk saat ini program tersebut masih menjadi pertanyaan apakah program tersebut sudah berhasil atau belum, karena kenyataan untuk saat ini masih banyak masyarakat yang ada di pedesaan masih mengalami kesulitan dalam mencari penghidupan yang layak. Pelaksanaan PNM masih memiliki berbagai masalah ini terjadi di berbagai daerah seperti Indikasi kurangnya penyuluhan berkelanjutan dan sosialisasi yang diberikan kepada nasabah.

Maka peneliti merasa tertarik untuk menggali dan mengkaji kembali melalui penelitian tentang mengenai sejauh mana kegiatan program PT PNM Mekar ini dalam menanggulangi masalah kemiskinan pada masyarakat Kelurahan Antapani Kidul tersebut. oleh karena itu, penulis angkat judul: Mekanisme Program Kredit Mikro

---

<sup>5</sup> <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>: diakses pada tanggal 18 Juli 2019 pukul 01:05.

Mekar PT PNM dalam Menanggulangi kemiskinan (Penelitian di Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani Kota Bandung).

## 1.2 Identifikasi Masalah

Mencermati paparan latar belakang masalah dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut: Indonesia adalah negara salah satu negara berkembang yang masih memiliki banyak permasalahan salah satunya yaitu kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan krusial suatu negara, kemiskinan memiliki banyak dampak bagi sektor kehidupan suatu bangsa, pemerintah sebagai tempat pengaduan rakyat selayaknya memberikan penanganan terhadap masalah kemiskinan yg dialami rakyatnya. Oleh karenanya pemerintah mengeluarkan program PNM yang dimaksudkan untuk mengatasi salah satu masalah sosial ekonomi.

## 1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Program Sosial Ekonomi Dalam Penanggulangan Kemiskinan Kredit Mikro Mekar PT PNM di Kelurahan Antapani Kidul ?
2. Bagaimana Proses Penanggulangan Program Sosial Ekonomi Mikro Mekar PT PNM di Kelurahan Antapani Kidul Dalam Menanggulangi Kemiskinan ?
3. Bagaimana Hasil yang di Capai Dalam Program Sosial Ekonomi Kredit Mikro Mekar PT PNM Dalam menanggulangi Kemiskinan di Kelurahan Antapani Kidul ?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Program Sosial Ekonomi Penanggulangan Kemiskinan Kredit Mikro Mekar PT PNM di Kelurahan Antapani Kidul.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Proses Program Sosial Ekonomi Kredit Mikro Mekar PT PNM di Kelurahan Antapani Kidul Dalam Menanggulangi Kemiskinan.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Hasil yang di Capai Program Sosial Ekonomi Kredit Mikro Mekar PT PNM Dalam menanggulangi Kemiskinan di Kelurahan Antapani Kidul.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk penulis maupun pembaca, antara lain:

1. Secara Praktis : Penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi para pembaca khususnya mahasiswa dan pengambil kebijakan yang berguna dalam memahami pengaruh kredit usaha mikro yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang perlu dipacu untuk mengatasi masalah kemiskinan.
2. Secara Teoritis : Penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu sosiologi khususnya sosiologi pembangunan dan sosiologi ekonomi. Manfaat khusus

bagi ilmu pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian mengenai tingkat kemiskinan dengan mengungkap secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhinya.

## 1.6 Kerangka Pemikiran

Kemiskinan adalah kondisi deprivasi (kehilangan) terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dasar.<sup>6</sup> Parsudi Suparlan, mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Kemiskinan oleh Soerjono Soekanto diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kehidupan tersebut.<sup>8</sup> Kemiskinan dilihat dari berbagai faktor antara lain: pendapatan yang rendah, perluasan kemiskinan yaitu keluarga miskin yang menghasilkan keturunan miskin yang baru dan juga kebiasaan sehari-hari yang membuat hidup miskin seperti mengkonsumsi barang mahal/mewah, walaupun keadaan ekonominya pas-pasan. Kemiskinan banyak

---

<sup>6</sup> Bambang Sudibyo dkk, *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1995), hlm. 9.

<sup>7</sup> Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, (Jakarta: YOI, 1995), hlm. 11.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 349.



terjadi wilayah tertentu yang tersebar di desa dan tidak menutup kemungkinan juga terjadi di kota.

Tanggung jawab masalah kemiskinan bukan hanya tanggungjawab kementerian, sector atau bidang tertentu sehingga pemerintah membuat kebijakan dan program yang pro poor. Dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan, pemerintah memiliki banyak program yang bermuara kepada masyarakat meski dengan membuka akses atau peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau yang lebih dikenal dengan Permodalan Nasional Madani (PNM) yang diajukan untuk keluarga miskin yang berfokus peningkatan kualitas khusus peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ekonomi.

Misi Permodalan Nasional Madani (PNM) adalah mengupayakan perubahan taraf hidup keluarga miskin yang pada akhirnya dapat memutus mata rantai kemiskinan. Kebijakan atau misi ada kalanya tidak sesuai dengan cita-cita atau harapan yang dicapai kadang justru kemiskinan masyarakat secara struktural, hal demikian dapat terjadi pada program pemerintah yang tidak tepat sasaran, seperti yang terungkap bahwa ada kecenderungan masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan untuk usaha maupun untuk kesehatan dan pendidikan tetapi dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

sehari-hari bahkan dalam kasus yang fatal penerima bantuan malah dipergunakan untuk membeli barang-barang smartphone, tv dan lain sebagainya,

hal ini terjadi karena program penanggulangan kemiskinan memerlukan penanganan dan dampingan yang komprehensif dan terpadu, bersirnegi dan berkelanjutan, belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan dan masih rendahnya penghasilan masyarakat dan minimnya akses pemenuhan kebutuhan dasar, kesehatan, pendidikan dan pangan.

Merujuk pada kasus-kasus penyalahgunaan dana bantuan yang telah dijelaskan diatas maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa program tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya atau dalam teori fungsional struktural Robert K Merton disebut sebagai disfungsi. Teori struktural fungsional Merton menerapkan konsep fungsi dan disfungsi dalam sistem sosial masyarakat. Fungsi apabila konsekuensi-konsekuensi yang dapat diamati dan dibuat dengan tujuan adaptasi atau penyesuaian dari sistem tertentu. Adaptasi dan penyesuaian selalu bermakna positif bagi sistem. Kemudian mengenalkan konsep disfungsi untuk melihat adanya konsekuensi-konsekuensi yang justru merusak atau berakibat negatif pada sistem.<sup>9</sup>

Dari teori tersebut dapat di simpulkan bahwa struktur sosial dalam masyarakat terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Begitupun dalam program yang di laksanakan oleh PT PNM, apabila program Mekar dapat dilakukan secara efektif maka berdampak

---

<sup>9</sup> George Ritzer. *Sociological Theory*, 8th Edition. (New York: McGraw-Hill, 2010), h. 253.

positif dan berhasil dalam penanganan kemiskinan. Sebaliknya, jika program Mekar yang dilaksanakan tidak efektif maka gagal dalam penanganan kemiskinan.

**Gambar 1.1**

